

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2021

Muhammad Arif Darmawan¹⁾, Sukmini Hartati²⁾, Muhammad Husni Mubarak³⁾
^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: mhusnimubarak@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam menguji pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum) serta Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan maupun parsial. Objek penelitian yang dijalankan ialah 13 kabupaten serta 4 kota di Sumatera Selatan yang sudah memberikan laporan keuangan ditahun 2017-2021. Dalam penelitian yang dijalankan, data yang dipakai ialah berwujud Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota/ Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Teknik dalam mengumpulkan data lewat teknik dokumentasi. Untuk analisis datanya dilakukan dengan analisis kuantitatif, dan metode regresi berganda memakai software SPSS 26. Hasil penelitiannya yang dijalankan memperlihatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum) serta Belanja Modal dengan bersamaan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan. Namun secara parsial hasil penelitiannya memperlihatkan jika, PAD (Pendapatan Asli Daerah) mempunyai pengaruh secara signifikan positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. DAU (Dana Alokasi Umum) mempunyai pengaruh yang signifikan negatif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah.

Abstract

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province simultaneously or partially. The objects of this research are 13 regencies and 4 cities in South Sumatra which have submitted financial reports for 2017-2021. In this study, the data used is in the form of District/City Budget Realization Reports (LRA) in South Sumatra Province for 2017-2021. Data collection techniques through documentation techniques. Data analysis was carried out using quantitative analysis, with multiple regression methods using SPSS 26 software. The results of this study indicate that Regional Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditure simultaneously affect financial performance. However, partially the results of the study show that Regional Original Income (PAD) has a significant positive effect on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. The General Allocation Fund (DAU) has a significant negative effect on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. Capital Expenditure has a significant negative effect on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province.

Keywords: *Regional Own Revenue, general allocation funds, capital expenditures, Financial Performance of the Regional Government*

1. PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah menyebutkan jika pemerintah daerah diberikan wewenang dalam melakukan pengaturan seluruh urusan pemerintah daerahnya.

Pemerintahan daerah di harapkan dapat membuat peningkatan pelaksanaan serta pengelolaan yang baik melalui peninjauan setiap prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, dan keistimewaan serta keanekaragaman daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik diantaranya bisa terlihat pada kinerja

keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa terpengaruh dari sejumlah faktor, contohnya PAD, DAU serta Belanja Modal.

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dapat diartikan menjadi keahlian pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan efektif, efisien serta terbuka untuk meraih tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi rakyat. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga bisa diukur pada segi kesehatan keuangan, kemandirian keuangan, dan kinerja fiskal (Mulyadi, 2014:410). Yang dimaksudkan ialah, kinerja keuangan merupakan parameter dalam menilai laporan keuangan pemerintahan layak atau tidaknya tersebut. Yang dimaksudkan ialah, kinerja keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai laporan keuangan pemerintahan layak atau tidaknya tersebut. Didasari dari informasi yang di akses dalam sumsel.antaraneews.com ditanggal 30-11-2022 diterangkan jika Realisasi penyerapan APBN di Provinsi Sumatera Selatan mencapai senilai Rp36,38 triliun atau 85,21% per November 2022 dari pagu anggaran tahun. Dalam hal ini, berdasarkan Forum Aset dan Liabilities Committee (ALCo) Sumsel dengan anggotanya semua instansi vertikal Kemenkeu di Sumsel, menyebutkan realisasi APBN ini merupakan untuk menstabilisasi perekonomian di Sumsel. Namun hal ini juga, kinerja keuangan pemerintah daerah didapati banyak kecurangan, pengelolaan keuangan daerah yang lemah pun merupakan indikator berpotensi adanya korupsi pada kegiatan pengelolaan. Didasari dari informasi yang di akses dalam merdeka.com ditanggal 30-11-2022 diterangkan jika tiga pejabat Desa Darmo, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan, dipenjara karena menyelewengkan pemakaian keuangan desa pada kompensasi PT. MME (Menambang Muara Enim) yang dikorup sebesar Rp15,5 miliar.

Pendapatan Asli Daerah ialah perolehan yang didapatkan daerah dari pungutan didasari dari Perda mengikuti pada aturan UU Bab 1, Ayat 18 UU No. 33 Tahun 2004. PAD adalah semua pendapatan yang asalnya pada sumber ekonomi asli daerahnya. Didasari dari informasi yang diakses pada sumsel.antaraneews.com pada tanggal 29-10-2022 dijelaskan bahwa ditahun tersebut terjadi penurunan pada tahun sebelum itu, Realisasi PAD Kota Palembang, Sumsel sampai Oktober 2022 meraih Rp. 895 M ataupun

82,93 % berdasarkan sasarannya yaitu Rp1,080T. Dalam hal ini, PAD belum tercapai sesuai dengan target yang 5 dituju.

DAU ialah dana yang sumbernya dari pendapatan APBD dan alokasinya untuk pemerataan daya keuangan diantara daerah dalam mendanai keperluan daerah untuk tujuan melaksanakan Desentralisasi (Nordriawan, 2017:87). Ditinjau pada informasi yang di akses di palembang.tribunnews.com ditanggal 28-06-2020 diterangkan jika terjadinya tindak korupsi penggunaan dana kelurahan di semua kelurahan pada Kota Prabumulih, dana itu merupakan dari dana yang semua itu sumbernya pada DAU dengan kisaran yang bernilai Rp8,8 miliar. Dalam hal tersebut dapat berpengaruh terhadap berkurangnya atau hilangnya anggaran dari DAU. DAU sangatlah penting bagi daerah yang terkait dikarenakan dapat meminimalisir kesenjangan kemampuan keuangan serta pelayanan umum antara daerah.

Belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan didalam mendapat aset tetap maupun yang lainnya yang memberikan kebermanfaatannya diatas 1 periode akuntansi. Agar tahu apakah sebuah kegiatan pembelanjaan bisa dikategorikan menjadi belanja modal ataupun tidak, jadi butuh kita ketahui pengertian aset tetap serta aset lain maupun kriteria dari kapitalisasi aset tetap (Mursyidi, 2013:305). Didasari dari informasi yang di akses di detik.com ditanggal 09-12-2022 disebutkan jika terjadinya korupsi pembangunan gedung DPRD di Sumatera Selatan. Pada kasus yang terkait yaitu PT Adhi Pramana Mahogra yang menjadi penjalan proyek tak melakukan pekerjaan sampai selesai mengikuti pada kontrak. Perusahaan tersebut malah stop bekerja ketika persentase pekerjaan terhitung 2,76%. "Namun penyedia sudah melaksanakan pencairan uang muka sebanyak 20 persen berdasarkan nilai kontrak yakni senilai Rp7.110.534.600" ungkap Penkum Kejari Sumsel. Maka, daripada itu Belanja Modal sangatlah penting dalam pembangunan infrastruktur daerah agar lebih maju.

Didasari dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, jadi peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian mengenai pengaruh dari PAD, Dana Alokasi Umum serta Belanja Moda pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

2. TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Dijelaskan oleh Halim (2004:96) tentang PAD menyatakan bahwa: pendapatan asli daerah merupakan seluruh yang diterima serta didapatkan daerah didasari dari setiap sumber pada wilayah mereka yang diambil didasari dari perda mengikuti pada aturan UU yang ada. Sektor penghasilan daerah berperan begitu penting, dikarenakan lewat sektor tersebut bisa terlihat seberapa jauh sebuah daerah bisa mendanai aktivitas pembangunan serta pemerintahan daerahnya. Dijelaskan oleh Herlina Rahman (2005:38) tentang PAD menyatakan bahwa: PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber pada hasil mengelola potensi daerah yang terpisah seperti hasil pajak daerah dan retribusi maupun hal lain, PAD yang sah didalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan otonomi daerah menjadi wujud dari asas desentralisasi.

Kesimpulannya dari Pendapatan Asli Daerah ialah, pentingnya sumber penghasilan ini bagi pemerintah daerah dalam mendanai bermacam program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin besar PAD suatu daerah, makin besar juga kemampuan pemerintah daerah dalam membuat peningkatan kualitas hidup penduduk dan membangun infrastruktur dengan lebih baik. Dengan demikian, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya.

Dana Perimbangan

Dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan perimbangan keuangan diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ialah sebuah sistem membagi keuangan secara adil, demokratis, proporsional dan efisien serta transparan untuk kegiatan membiayai pelaksanaan desentralisasi, melalui pertimbangan keadaan, potensi serta keperluan daerah, dan total pendanaan pelaksanaan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Kemudian pada ayat 9 dinyatakan jika, dan perimbangan merupakan dana yang sumbernya pada penghasilan APBN yang di alokasikan terhadap daerah dalam membiayai keperluan daerah untuk tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Dan dalam pasal 10 disebutkan

jika, dana perimbangan terdiri atas: DAU, DBH serta DAK.

Dana Bagi Hasil

Ditinjau pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan di antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, menerangkan jika DBH ialah “dana yang sumbernya pada penghasilan APBN yang di alokasikan terhadap daerah didasari dari persen dalam membiayai keperluan daerah untuk tujuan penyelenggaraan Desentralisasi”. UU itu menerangkan pula jika Dana Bagi Hasil sumbernya pada SDA serta pajak. Hal itu diterangkan seperti dibawah ini:

- DBH yang sumbernya pada pajak antara lain: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta PPh (Pajak Penghasilan) dalam pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negri (WPOP) serta pasal 21 tentang pajak penghasilan.
- DBH yang sumbernya pada SDA asalnya antara lain: Pertambangan Gas dan Panas Bumi, Kehutanan, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum.

Dana Alokasi Umum

Dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, DAU ialah dana yang diberi pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah secara berkala serta wajib dalam pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang merupakan wewenang daerah. Dijelaskan oleh Halim (2016:127) membahas tentang tujuan diadakannya DAU atau Dana Alokasi Umum menyatakan bahwa: DAU diharap bisa meminimalisir ketimpangan pada keperluan pendanaan daerah, memberi kepastian untuk daerah supaya bisa mendanai keperluan dan pengeluaran daerah, memberi kepastian untuk daerah supaya bisa mendanai keperluan dan pengeluaran daerah itu yang merupakan tanggung jawab pada tiap daerah dan proporsi setidaknya 26 persen berdasarkan pendapatan didalam negri bersih yang sudah ditentukan pada APBN. DAU dipakai dalam menolong pemenuhan semua keperluan dari setiap daerah baik belanja yang dimaksudkan belanja pegawai ataupun membangun infrastruktur ataupun keperluan lainnya di setiap daerah untuk tujuan penyelenggaraan desentralisasi, DAU itu sumbernya pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan UU No. 23 Tahun

2014 mengenai Pemerintah daerah, DAU ialah dana yang diberi oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah daerah secara berkala serta wajib dalam pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merupakan wewenang daerah. DAU merupakan sebuah sumber penghasilan asli daerah yang terpenting karena besaran DAU yang diterima oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, seperti luas wilayah, jumlah penduduk serta tingkatan kemiskinan di daerah tersebut.

Kesimpulannya DAU ialah satu sumber penghasilan asli daerah yang penting bagi tiap pemerintah daerah di Indonesia, serta besaran DAU yang diterima ditentukan berdasarkan sejumlah faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk serta tingkat kemiskinan. DAU juga diharapkan dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, serta mempercepat pembangunan di Indonesia dengan keseluruhan. Karena hal tersebut, penting untuk pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan DAU dengan baik dan transparan, supaya bisa memberi manfaat yang optimum untuk penduduk dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus

PP RI No. 55 Tahun 2005 yang berisi Dana Perimbangan, menerangkan jika: DAU merupakan dana yang sumbernya penghasilan APBN yang di alokasikan bagi sebuah daerah yang bertujuan dalam menolong pendanaan suatu aktivitas yang merupakan kepentingan daerah serta mengikuti pada prioritas nasional. Pemakaian Dana Alokasi Khusus dilaksanakan mengikuti pada Petunjuk Teknis pemakai DAU. Dana Alokasi Khusus tak bisa dipakai dalam membiayai persiapan aktivitas fisik, administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas, Dijelaskan oleh Halim (2017:150) yang membahas tentang definisi DAK menyatakan bahwa: DAK ialah dana yang sumbernya pada penghasilan APBN yang dialokasi untuk suatu daerah yang tujuannya dalam menolong pembiayaan tujuan khusus yang merupakan kepentingan daerah serta mengikuti pada prioritas nasional. Perolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan oleh daerah wajib mematuhi setiap rambu yang sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat.

Belanja Modal

Dijelaskan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Belanja Modal ialah dana yang dikeluarkan yang dipakai dalam mendapatkan ataupun meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan pada jangka waktu yang lama, minimal tiga tahun. Aset tetap tersebut dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, jalan, jembatan, dan sejenisnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim, (2016:214) membahas tentang Belanja Modal menyatakan bahwa: Belanja yang bisa memberi dorongan pertumbuhan perekonomian dengan riil. Infrastruktur yang di biayai dengan belanja modal nanti dapat mencepatkan roda ekonomi hingga ekonomi bisa dijalankan secara lancar karena sebaran jasa maupun barang dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Tetapi kenyataannya realisasi belanja modal diakhir tahun biasanya tak sampai sasaran yang di anggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara, realisasi belanja pegawai biasanya melewati sasaran yang sudah di anggarkan. Itu memperlihatkan diakhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan dalam pemenuhan sasaran belanja lewat meningkatkan belanja pegawai dibanding pemenuhan target belanja modal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dijelaskan oleh Mulyadi, (2014:410) membahas tentang Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan jika: Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai keahlian pemerintah daerah didalam manajemen keuangan daerah dengan efektif, efisien, serta transparan untuk meraih tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga bisa diukur berdasarkan segi kesehatan keuangan, kemandirian keuangan, dan kinerja fiskal. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah mengelola jika kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil capaian dari pelaksanaan APBD yang sudah di susun didalam rangka mencapai tujuan daerah serta mempertahankan keseimbangan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah di ukur dari aspek efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Tujuan dari

kinerja keuangan pemerintah daerah ialah dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang di jalankan menggunakan tiga variabel independen: PAD (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Belanja Modal (X3) dan satu variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian yang dilakukan ialah semua Kota/Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 4 Kota dan 13 Kabupaten. Sampel dipilih menggunakan Teknik sampling jenuh, maka pemerintah daerah yang merupakan sampel penelitian yaitu Dokumen berwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021.

Teknik Analisis Data

Didalam melakukan analisis data menggunakan teknik yaitu metode analisis statistik menggunakan software SPSS 26 menggunakan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif ialah statistik yang dipakai dalam menganalisis data melalui pendeskripsian ataupun mencerminkan data yang telah terkumpul dengan tak terdapat tujuan memberi simpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalis, (Sugiyono, 2022:147). Pengujian yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah pengujian statistik memakai *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian normalitas berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov* apabila signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 jadi, data memiliki sebaran normal. Apabila signifikansinya lebih kecil sama dengan 0,05 jadi, data tak mempunyai sebaran yang normal. Pengujian Multikolienaritas model regresi disebut baik apabila tak ada korelasi di antara variable independen. Terdapat maupun tidak multikolienaritas bisa terlihat pada nilai toleransi serta lawan dari itu yakni VIF. Nilai *cutoff* secara umum dipakai untuk memperlihatkan terdapatnya multiokolienaritas ialah apabila nilai tolerance < 0.10 ataupun = nilai variance inflation fanctor > 10 bisa kita katakan pada data itu ada multikolienaritas. Pengujian auto korelasi mempunyai tujuan

dalam melakukan uji apakah didalam model regresi linear ada korelasi diantara kesalahan pengganggu diperiode t pada kesalahan pengganggu diperiode t-1 (sebelum itu). Auto korelasi timbul dikarenakan observasi yang bersusun setiap waktu berhubungan satu sama lainnya. Hal itu biasanya ada didata runut waktu (*timeseries*), dikarenakan sampel ataupun observasi tertentu memiliki kecenderungan terpengaruh dari observasi sebelum itu. Dalam melihat terdapat ataupun tidak auto korelasi melalui pengujian *Durbin Watson (DW test)* (Ghozali, 2018:111). Pengujian Heterokedastisitas memiliki tujuan menguji apakah pada model regersi tersebut terdapat ketidak samaan antara variable dengan residual satu pengamat yang lainnya. Tak ada heterokedasitas apabila tak adanya pola secara jelas ataupun tak memiliki gelombang, tak terdistribusi maupun tak menyempit digambar *scater plot*, dan setiap titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, (Ghozali, 2018:113).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Analisis Data

Hasil olah datanya dilakukan menggunakan software SPSS 26 memberikan hasil koefisien regresi serta hubungan fungsional variable X pada Y di tunjukkan ditabel berikut:

Tabel 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
	1 (Constant)	1.666	1.660			
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.835	.039	1.329		21.501	.000
Ln_Dana Alokasi Umum	-.293	.064	-.225		-4.560	.000
Ln_Belanja Modal	-.489	.052	-.486		-9.410	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan Pemerintah} = 1,666 + 0,835 \text{ LnPAD} - 0,293 \text{ LnDAU} - 0,489 \text{ LnBM} + e$$

Model regresi itu memberi isyarat jika PAD, DAU serta Belanja Modal di anggap konstan, jadi Kinerja Keuangan Pemerintah dapat meningkat senilai 1,666 pada tahun 2017-2021. Tetapi, meskipun DAU dan Belanja Modal menurun Kinerja Keuangan Pemerintah tetap bisa meningkat dikarenakan kebutuhan pemerintah masih dapat dibiayai dari PAD. Sebaliknya, apabila PAD menurun jadi Kinerja Keuangan Pemerintah pun juga akan menurun.

Hasil Uji Statistik F

Hasil dari pengujian statistik memperlihatkan nilai F didapat lewat tabel Anova (*Analysis of Varians*) yang disajikan ditabel berikut:

Tabel 2
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2515.161	3	838.387	262.552	.000 ^b
Residual	258.651	81	3.193		
Total	2773.812	84			

a. Variable terikat:

Kinerja_Keuangan_Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Belanja_Modal, Dana_Alokasi_Umum, Pendaptan_Aslu_Daerah

Hasil pengujian statistik terhadap F ditabel 4.9 di atas dalam melakukan uji pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal mempunyai F-hitungnya senilai 262,552 dan nilai signifikansinya 0,000 hal itu mengartikan tingkatan signifikansinya < 5% ($\alpha = 0,05$) serta F-hitungnya senilai 262,552 > F-tabel senilai 2,717 yang berarti bisa kita simpulkan jika PAD, DAU, beserta Belanja Modal dengan bersamaan berpengaruh secara signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah.

Uji Koefisien Detereminasi (R²)

Hasil uji data dengan software SPSS 26 diperoleh nilai R² sebesar 0,903

Tabel 3
Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	1.787	1.222

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pada pengujian dengan analisis regresi berganda bisa kita ketahui *Adjusted R Square* senilai 0,903. Mengartikan hasil tersebut artinya 90,3% variable kinerja keuangan pemerintah bisa diterangkan dari ketiga variable independen yakni PAD, DAU, serta Belanja Modal, sedangkan, selebihnya senilai 90,3% artinya 9,7% diterangkan dari variabel lainnya di luar model penelitian yang dilakukan.

Uji Statistik T

Hasil pengujian statistik pada T disajikan pada tabel 4 ini:

Tabel 4
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.666	1.660		1.003	.319
	Ln_Pendapatan Asli Daerah	.835	.039	1.329	21.501	.000
	Ln_Dana Alokasi Umum	-.293	.064	-.225	-4.560	.000
	Ln_Belanja Modal	-.489	.052	-.486	-9.410	.000

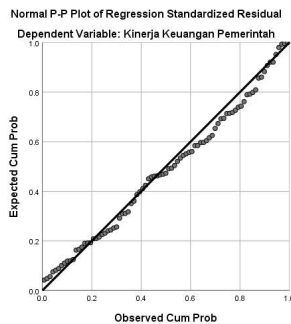
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Ditinjau ditabel diatas, Variable Pendapatan Asli Daerah (X₁) mempunyai t_{hitung} yakni 21,501 dengan t_{tabel} 1,989. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa kita simpulkan jika tolak Ho₁ serta terima Ha₁. Artinya dengan parsial variabel independen yakni PAD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada variable terikat yakni Kinerja

Kuangan Pemerintah. Variable Dana Alokasi Umum (X_2) dalam hasil pengujian parsial memperlihatkan variable independen yakni DAU bernilai sig $0,017 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} yakni $-4,560$ dengan t_{tabel} $-1,989$. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa dibuat simpulan jika tolak H_{o2} serta terima H_{a2} . Berarti dengan parsial variable bebas yakni DAU memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada variable terikat yakni Kinerja Keuangan Pemerintah. Hasil pengujian parsial memperlihatkan variable independen yakni belanja modal (X_3) bernilai sig $0,00 < 0,005$ serta nilai t_{hitung} yakni $-9,410$ dengan t_{tabel} $-1,989$. Dengan demikian hipotesis penelitian bisa kita tarik simpulan apabila kita tolak H_{o3} serta terima H_{a3} . Artinya dengan parsial variabel independen yakni Belanja modal mempunyai pengaruh yang negatif serta signifikan pada variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintah.

Uji Normalitas

Dibawah ini ialah hasil pengujian normalitas pada daya memakai analisis grafik Normal Probability Plot:



Gambar 1
Analisis Grafik Normal Probability Plot

Dari hasil uji diatas menunjukkan digambar atas bisa kita ketahui jika sumbu terdistribusi di sekitar garis diagonal jadi bisa kita simpulkan jika *Normal Probability Plot* mempunyai sebaran dengan normal. Jadi model regresi mencukupi asumsi normalitasnya. Apabila dilihat dengan visual grafik tersebut terlihat normal, namun dengan statistik tidak pasti normal. Dalam hal ini, diperlukan uji statistik melalui pemakaian penguji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian tersebut dipakai dalam mengetahui distribusi data, dalam penelitian ini dilakukan distribusi residual apakah terdistribusi normal atau tidak. Dibawah ini ialah hasil uji normalitas data melalui

pengujian statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S):

Tabel 5
Uji Statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75475761
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.039
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil *test of normality* diatas kita ketahui nilai statistiknya 0,067 ataupun nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 ataupun 20 persen > nilai α 5%. Dalam hal ini bisa kita tarik kesimpulan jika residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dibawah itu ialah Uji Multikolonieritas:

Tabel 6
Uji Multikolinearitas *Coefficients*^a

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1.(Constant)	1.666	1.660			1.003	.319		
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.835	.039	1.329	21.501	.000		.376	2.659
Ln_Dana Alokasi Umum	-.293	.064	-.225	-4.560	.000		.592	1.688
Ln_Belanja Modal	-.489	.052	-.486	-9.410	.000		.539	1.854

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

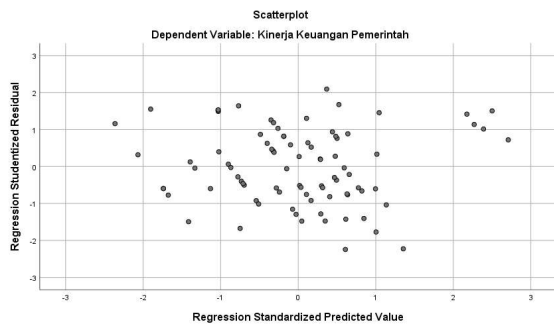
Hasil Uji Multikolonieritas diatas dapat diperoleh nilai toleransi variabel dan VIF independennya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah nilai toleransi variabel $0,376 > 0,10$. Sementara itu nilai VIF $2,659 < 10,00$.
2. Dana Alokasi Umum nilai toleransi variabel $0,592 > 0,10$. Sedangkan, nilai VIF $1,688 < 10,00$
3. Belanja Modal bernilai toleransi variabel $0,539 > 0,10$. Sementara itu nilai VIF $1,854 < 10,00$.

Kesimpulannya, Besaran uji multikorelasi ini bisa kita tarik kesimpulan tak ada multikorelasi pada penelitian yang dijalankan.

Uji Heteroskedastisitas

Cara yang digunakan pada penelitian yang dijalankan dalam mendeteksi terdapat ataupun tidak heteroskedastisitas ialah melalui meninjau grafik Plot diantara nilai bilangan variable terikat yakni ZPRED dan residual SRESID. Pendeteksian terdapat maupun tidak heterokedastisitas bisa dilaksanakan melalui peninjauan terdapat ataupun tidak sebuah pola digrafik *scatterplot* di antara ZPRED maupun SRESID dimana sumbu Y ialah yang telah dirama, dan sumbu X ialah residual (Yprediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*.



Gambar 2
Hasil Scatterplot Model

Berdasarkan hasil *Scatterplot* Model digambar diatas bisa kita ketahui jika tak ada pola yang teratur, dan sejumlah titik terdistribusi diatas dan dibawah angka 0 disumbu Y. Dalam hal ini bisa kita tarik simpulan jika tak ada Heterokedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian Glesjer ditabel dibawah ini memperlihatkan koefisien parameter untuk

variabel bebas hanya variable PAD serta Belanja Modal secara signifikan, hal itu kelihatan pada *probability* signifikansi di atas tingkatan kepercayaan 5 persen ($\alpha = 0,05$). Jadi bisa kita simpulkan model regresi tak terdapat Heterokedastisitas. Berikut ini ialah hasil pengujian Glesjer:

Tabel 7
Hasil Uji Glesjer
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	1.556	.774	2.012	.048
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.045	.018	.400	.2466
Ln_Dana Alokasi Umum	-.118	.030	-.509	-3.940
Ln_Belanja Modal	.024	.024	.135	.997

a. Dependent Variable: Abs_RES

Uji Autokorelasi

Dibawah ini merupakan tabel hasil dari pengujian Auto Korelasi (Durbin Watson):

Tabel 8
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	.903	1.787

a. Predictors: (Constant), Belanja_Modal, Dana_Alokasi_Umum, Pendaptan_Aslis_Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26 (2023)

Didasari dari hasil uji auto korelasi bisa kita ketahui nilai *Durbin-Watson* bagi hipotesis senilai 1,222. Hal tersebut terdapat autokorelasi dikarenakan nilai *Durbin-Watson* terdapat di luar

batas nilai DU (1,721) dan 4-DU (2,279). Dalam menangani hal itu jadi dipakai metode *Cochrane-Orcutt* (CO). Alasannya dikarenakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada data *timeseries*. Autokorelasi terjadi ketika terdapat korelasi antara nilai-nilai yang berurutan dalam deret waktu, yang bisa membuat hasil yang tak konsisten atau bias pada analisis regresi. Diterangkan oleh Ghozali (2011: 121) “Metode *Cochrane-ortcutt* = (CO) adalah suatu metode yang dipakai dalam menangani permasalahan auto korelasi, yang mana data penelitian di ubah pada wujud lag”. Hasil pengujian auto korelasi sesudah model di literasikan untuk pertama kali ialah seperti dibawah ini:

Tabel 9
Uji Autokorelasi *Cochrane-Orcutt*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.930 ^a	.865	.860	1.64501	2.193

a. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Berdasarkan pengujian autokorelasi metode *Cochrane-Orcutt* sesudah iterasi pertama diketahui nilai DW senilai 2,193. Artinya bahwa nilai DW ada pada daerah $dU < DW < 4-dU$, yakni $1,712 < 2,193 < 2,279$. Didasari dari hasil pengujian itu bisa kita simpulkan jika tak terjadinya auto korelasi.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Nilai F hitung senilai $262,552 > F_{tabel}$ senilai 2,717 yang berarti bisa kita simpulkan jika PAD, DAU serta Belanja Modal dengan bersamaan mempunyai pengaruh signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah. Bila Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maupun kota di Sumsel menurun, adanya DAU serta belanja modal akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Serta kota itu. Hasil pengujian koefisien determinasi juga memperlihatkan nilai senilai 0,903 (90,3%). berarti, kontribusi pada DAU, PAD serta belanja modal bisa membuat peningkatan kinerja

keuangan senilai 90,3%, sementara selebihnya 9,7% diterangkan dari variable lainnya di luar model penelitian yang dilakukan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil dari penelitian yang di jalankan memperlihatkan jika PAD t_{hitung} yakni 21,501 dengan t_{tabel} 1,989. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa ditarik simpulan jika tolak H_{01} dan terima H_{a1} . Berarti dengan parsial variable bebas yakni PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan pada variable terikat yakni Kinerja Keuangan Pemerintah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian T bagi variable DAU menunjukkan nilai t_{hitung} yakni -4,560 dengan t_{tabel} -1,989. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa kita tarik simpulan tolak H_{02} serta terima H_{a2} . Artinya dengan parsial variabel independen yakni DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian T untuk variable belanja modal menunjukkan nilai t_{hitung} yakni -9,410 dengan t_{tabel} -1,989. Dengan demikian hipotesis penelitian bisa kita tarik simpulan jika tolak H_{03} serta terima H_{a3} . Berarti dengan parsial variabel independen yakni Belanja modal mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada variabel dependen yakni Kinerja Keuangan Pemerintah.

5. SIMPULAN

Penelitian yang mempunyai tujuan dalam meninjau sebesar apa pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Didasari hasil pengujian serta penelitian dihipotesis yang sudah dilaksanakan pada empat simpulan antara lain:

Pertama, PAD memberikan pengaruh secara signifikan positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji Pendapatan Alokasi Umum tersebut mengikuti pada teori serta hipotesis sebelum ini menyebutkan jika

PAD mempunyai pengaruh secara signifikan positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kedua, hasil penelitian yang dilaksanakan memperlihatkan jika Dana Alokasi Umum memberi pengaruh secara negatif signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji itu mengikuti dengan teori serta hipotesis sebelum ini yang menyebutkan jika DAU memberi pengaruh yang signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ketiga, hasil dari penelitian yang di jalankan memperlihatkan apabila Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan negatif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Keempat, PAD, DAU serta Belanja Modal mempunyai pengaruh secara simultan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2005.
- Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia. (2003). UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. *Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.*
- Halim, Abdul. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik. *Jakarta: Salemba Empat*
- Halim, Abdul (2017). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba 4.*
- Herlina, Rahman. (2005). Pendapatan Asli Daerah. *Jakarta: Arifgosita.*
- Mulyadi (2014). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Rahman, Herlina, (2005). Pendapatan Asli Daerah. *Jakarta: Arifgosita.*
- Sugiyono (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta.*